

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pihak-pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta informasi atas aktivitas jual beli efek. Di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat sembilan sektor yaitu: pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang dan konsumsi, properti, infrastruktur; utilitas; dan transportasi, keuangan, perdagangan; jasa; dan investasi. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang paling banyak terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Dibawah ini merupakan grafik jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai tahun 2020.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2018–2020

Sumber: invesnesia.com, data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas pada setiap tahun nya jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mengalami peningkatan. Perusahaan manufaktur

secara teknis dapat diartikan sebagai perusahaan industri yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi hingga mempunyai nilai jual (Hasanah, 2021). Dalam memproses pekerjaannya perusahaan manufaktur identik dengan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan pabrik. Perusahaan manufaktur dari segi ekonomi dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mentransformasi bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang menyumbangkan perusahaan manufaktur terbanyak dengan persentase 20,5%, maka dari itu perusahaan manufaktur menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Kemenperin, 2019).

Penulis memilih perusahaan manufaktur untuk dijadikan objek penelitian karena memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan, dengan dibutuhkannya tenaga kerja dalam proses bisnis pada sektor manufaktur maka perusahaan dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk dijadikan karyawan agar berkontribusi dalam perusahaan. Adanya proses yang berhubungan dengan ketenagakerjaan tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang harus dikelola dengan baik. Industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% di kuartal kedua 2021, dengan pertumbuhan 6,91% meski ada tekanan dari pandemi Covid-19. Sedangkan pada kuartal ke tiga 2021, industri manufaktur tumbuh 3,68% dan menyumbang 0,75 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Bkpm, 2022). Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak 2010, sektor manufaktur memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB Nasional, pada tahun 2021 manufaktur mencatatkan PDB sebesar Rp 2.946,8 Triliun, serta investasi sektor manufaktur di Indonesia mencapai Rp 325,4 Triliun, angka tersebut melewati target capaian investasi manufaktur yang diproyeksikan Kemenperin sebesar Rp 280 triliun hingga 290 Triliun (Kemenperin, 2022)

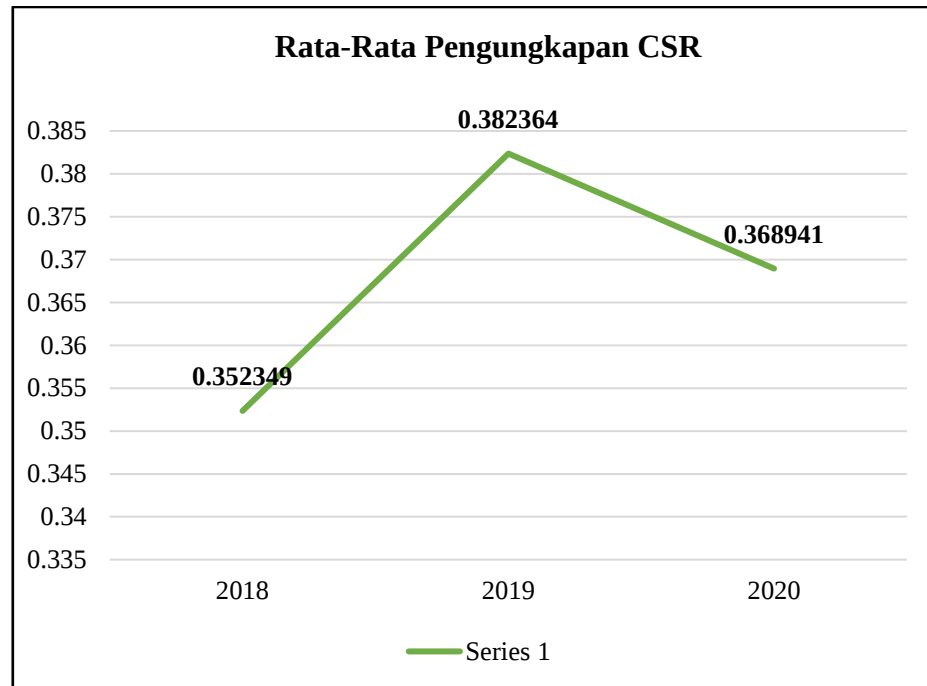
1.2 Latar Belakang Penelitian

Corporate Social Responsibility adalah suatu kewajiban moral perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat serta lingkungan sekitar perusahaan (Ningsih & Suzan, 2021). Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka yang selalu terdampak atas perusahaan di Indonesia, maka perusahaan-perusahaan yang bersinggungan dan berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat dituntut untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan, tidak hanya mencari keuntungan belaka. Perusahaan diharapkan tidak hanya berpijak pada *single bottom line*, yakni perusahaan yang hanya mencari keuntungan dalam aktivitasnya, namun perusahaan juga dituntut berpijak pada *triple bottom line* yaitu perusahaan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan aktivitasnya, namun juga memperhatikan aspek sosial, masyarakat serta lingkungan di sekitarnya.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatur peraturan tentang konsep *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Pasal 74 tahun 2007. Pemerintah juga lebih memperjelas lagi aturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012, pada pasal 2, dan pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada RUPS, serta perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dikenakan sanksi, sedangkan yang melaksanakan tanggung jawabnya akan mendapatkan penghargaan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 1 pasal 9 telah dijelaskan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Fenomena selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* mengacu pada data yang di olah penulis pada penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 hingga 2020, terdapat 193 perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di BEI pada tahun 2018 hingga 2020, namun hanya 36 perusahaan yang masuk dalam data sampel pada penelitian ini. Data pengungkapan *corporate social responsibility* yang diambil melalui *annual report*

perusahaan dengan melihat 149 item *GRI Standard* yang diungkapkan dan dijelaskan pada *annual report*, Berikut grafik pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 hingga 2020.



Gambar 1. 2 Pengungkapan CSR Perusahaan Manufaktur Tahun 2018–2020

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Berdasarkan data grafik pada gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility* pada tahun 2018 sebesar 0,352349 atau 52 item pengungkapan, pada tahun 2019 sebesar 0,382364 atau 57 item pengungkapan, dan pada tahun 2020 sebesar 0,368941 atau 54 item pengungkapan. Jika di rata-ratakan ketiga tahun tersebut pengungkapan sebesar 0,36 atau 54 item pengungkapan. Tiga perusahaan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* terendah pada tahun 2018 yaitu, PT Multistrada Arah Sarana Tbk dengan tingkat pengungkapan sebesar 25%, pada tahun 2019 yaitu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan tingkat

pengungkapan sebesar 29%, pada tahun 2020 yaitu, PT Eratex Djaja Tbk dengan tingkat pengungkapan sebesar 27%. Dengan data perusahaan dengan dan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* tersebut jika dibandingkan dengan total item pengungkapan berdasarkan GRI Standards, maka pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 hingga 2020 tersebut masih cukup rendah.

Uraian diatas menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* masih tergolong rendah, dengan ada nya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan akan pengungkapan *corporate social responsibility*. Dengan adanya kasus-kasus seperti yang dijelaskan diatas sekiranya dapat menumbuhkan kesadaran perusahaan di Indonesia agar tetap memperhatikan lingkungan, sosial, serta masyarakat sekitar perusahaan. Dengan memperhatikan Tanggung jawab sosial ini maka dapat membantu keberlangsungan bisnis di masa mendatang suatu perusahaan.

Perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial agar mencapai target dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*. Teori *stakeholder* merupakan teori yang memiliki tujuan untuk menunjang dan mempererat hubungan antar perusahaan dengan pihak-pihak luar agar mutu dalam persaingan juga ikut meningkat (Putri & Yuliandhari, 2020). Hal ini sangat penting karena melalui pengungkapan *corporate social responsibility* inilah para *stakeholder* dapat menilai dan mengetahui sejauh mana perusahaan dapat memberikan pengaruh positif terhadap sosial dan lingkungannya sesuai dengan yang diinginkan *stakeholder*

Political visibility menjadi variabel independen pertama yang dipilih oleh penulis dan digambarkan dengan ukuran perusahaan, secara teori perusahaan yang besar tidak mungkin lepas dari tekanan, serta perusahaan yang besar dengan tingkat operasinya yang besar dan tingkat keterkaitan nya dengan masyarakat juga besar maka pemegang saham akan lebih memperhatikan program sosial lingkungan perusahaan agar tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas (Saragi & Ginting, 2018). Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* adalah

political visibility (Agusti, 2021). Menurut Mapparessa *et al.* (2017) *political visibility* merupakan tekanan politik yang diberikan publik kepada perusahaan agar terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial yang dikeluarkan berhubungan dengan aspek politik dalam *corporate social responsibility*. *Political visibility* merupakan suatu biaya-biaya yang ditemukan dalam suatu perusahaan, yang jika perusahaan tersebut semakin besar maka semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena biaya ini menjadi sorotan dan dikritik oleh kelompok yang berkepentingan seperti masyarakat dan para aktivis sosial (Andi & Nur, 2017). Menurut Scoot (1997) dalam penelitian (Agusti, 2021) semakin besar *political visibility* yang dihadapi oleh perusahaan, maka manager akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi *political visibility* yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Perusahaan besar memiliki *political visibility* yang tinggi sehingga transparansi kepada publik semakin meningkat. Ukuran perusahaan yang besar akan lebih besar kemungkinan untuk dipengaruhi oleh publik. Pengaruh yang diberikan publik membuat perusahaan lebih sering mengungkapkan informasi untuk mengurangi kecurigaan publik terhadap biaya politik sebagai bentuk akan tanggung jawab sosial (Kinsey & Santoso, 2021). Dalam penelitian ini *political visibility* digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat perusahaan harus mempertimbangkan biaya politik dan manfaatnya ketika membuat keputusan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia, dan indikator yang digunakan yaitu LN Total Aset yang biasa digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan pada penelitian ini variabel *political visibility* dapat dilihat dari besaran ukuran perusahaan, yang jika perusahaan tersebut berukuran besar maka semakin besar pula *political visibility* yang mereka keluarkan untuk melakukan pengungkapan CSR, karena biaya ini menjadi sering sekali menjadi sorotan oleh masyarakat. Hasil penelitian Wahyuni *et al.* (2019) *political visibility* berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan karena semakin besar perusahaan maka akan semakin banyak pihak-pihak yang menjadi bagian dari stakeholder, sehingga perusahaan harus semakin luas melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Namun di sisi lain menurut Mapparessa *et al.* (2017) *political visibility* yang diukur dengan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi ukuran perusahaan maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin menurun, sebaliknya semakin rendah ukuran perusahaan maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin meningkat.

Variabel dependen ke dua yaitu pendidikan dewan komisaris, variabel ini dipilih karena pendidikan adalah sesuatu yang penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, dengan pendidikan ini maka seseorang akan mendapatkan sesuatu pekerjaan yang lebih baik, serta tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang komisaris juga akan menunjukkan sejauh mana komisaris itu akan sanggup berkompetisi dalam lingkungan pekerjaannya serta meningkatkan kualitas, kinerja, dan keputusan yang diambil untuk perusahaan dalam melakukan kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pada dasarnya perusahaan manufaktur yang dijadikan objek pada penelitian ini banyak dihadapi dengan permasalahan yang bersinggungan langsung dengan sosial dan lingkungan (Siregar & Khamimah, 2021). Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu pendidikan dewan komisaris (Harjoto *et al.*, 2019). Dalam penelitian Damanik & Dewayanto (2021) menjelaskan bahwa pendidikan dewan komisaris merupakan dewan yang memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar Doctor, Master dan PhD. Dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dapat memberikan pengawasan yang lebih baik serta pengambilan keputusan yang lebih optimal untuk perusahaan. Dalam penelitian ini pendidikan dewan komisaris digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pendidikan pada dewan komisaris dapat memberikan keputusan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Variabel ini diukur dengan skala rasio dengan indikator jumlah dewan

komisaris yang bergelar Doctor, Master dan PhD dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian pengaruh pendidikan dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu Harjoto *et al.* (2019) dan (Siregar & Khamimah, 2021). Hasil penelitian Harjoto *et al.* (2019) pendidikan dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, karena tingkat pendidikan mempengaruhi saran yang akan diberikan oleh seorang dewan komisaris terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Khamimah (2021) berbanding terbalik dengan menyatakan bahwa pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan ini dewan komisaris yang berpendidikan tinggi belum tentu mendukung tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Variabel ke tiga pada penelitian ini yaitu kewarganegaraan dewan komisaris, motivasi penulis mengambil variabel ini karena pada perusahaan manufaktur di Indonesia banyak komisaris yang berkewarganegaraan asing. Berdasarkan data yang diolah oleh penulis pada PT Indo Kordsa Tbk dan PT Malindo Feedmill Tbk memiliki tingkat dewan komisaris asing mencapai 80%, serta rata-rata tingkat dewan komisaris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 mencapai 46%. Sektor manufaktur di Indonesia merupakan perusahaan yang operasionalnya identik dengan pabrik dan limbah maka keberagaman kewarganegaraan pada dewan komisaris diharapkan dapat menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah menetapkan sistem globalisasi dan dapat memberi perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan dalam melakukan tindakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Hadya & Susanto, 2018). Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* dalam penelitian ini yaitu kewarganegaraan dewan komisaris, Kewarganegaraan dewan komisaris adalah salah satu keragaman dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris dengan kewarganegaraan asing memiliki wawasan dan informasi yang lebih luas

mengenai pasar internasional (Damanik & Dewayanto, 2021). Variabel ini dipilih untuk mengukur dan menjelaskan dampak yang diberikan dengan adanya dewan komisaris asing dalam kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Kewarganegaraan dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan indikator jumlah dewan komisaris berkewarganegaraan asing dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian pengaruh kewarganegaraan dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu Siregar & Khamimah (2021) dan (Hadya & Susanto, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Khamimah (2021) menjelaskan bahwa kewarganegaraan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena keberagaman kewarganegaraan pada dewan komisaris dapat menunjukkan bahwa suatu perusahaan dapat memberi perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Hadya & Susanto (2018) menyatakan bahwa kewarganegaraan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa status kewarganegaraan asing tidak menjamin peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang disajikan diatas masih terdapat inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian sebelumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh *Political Visibility*, Pendidikan Dewan Komisaris, dan Kewarganegaraan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018–2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu kewajiban moral perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat serta lingkungan sekitar perusahaan (Ningsih & Suzan, 2021). Pemerintah memeberikan aturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 pada pasal 2, dan ini pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada RUPS, serta perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dikenakan sanksi, sedangkan yang melaksanakan tanggung jawabnya akan mendapatkan penghargaan. Di lihat dari kenyataan yang ada di Indonesia praktik CSR ini masih rendah, pada sektor manufaktur juga masih terdapat perusahaan yang belum melakukan pengungkapan CSR secara maksimal sehingga masih mendapatkan tuntutan dari masyarakat sekitar perusahaan, sedangkan pemerintah telah mengatur peraturan tentang pelaksanaan CSR di Indonesia.

Secara teori perusahaan yang besar tidak akan lepas dari tekanan, dengan tingkat operasinya yang besar dan tingkat keterkaitan nya dengan masyarakat juga besar maka program sosial dan lingkungan akan semakin diperhatikan. Pada variabel lain yaitu pendidikan dewan komisaris, dengan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang komisaris juga akan menunjukkan sejauh mana komisaris itu akan sanggup menjalankan pekerjaannya serta meningkatkan kualitas, kinerja, dan keputusan yang diambil untuk perusahaan dalam melakukan kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Keberagaman kewarganegaraan dewan komisaris diharapkan dapat menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah menetapkan sistem globalisasi dan dapat memberi perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan dalam melakukan tindakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari hasil penelitian terdahulu mengungkapkan hasil yang inkonsistensi. Maka dari itu penulis tertarik melanjutkan dan ingin mengkaji kembali bagaimana pengaruh *political visibility*, pendidikan dewan komisaris dan kewarganegaraan dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, kewarganegaraan dewan komisaris, dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020?

2. Apakah *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020?
3. Apakah *political visibility* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020?
4. Apakah pendidikan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020?
5. Apakah kewarganegaraan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020.
2. Untuk mengetahui apakah *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020.
3. Untuk mengetahui apakah *political visibility* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020.

4. Untuk mengetahui apakah pendidikan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020.
5. Untuk mengetahui apakah kewarganegaraan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pengaruh *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris terhadap *corporate social responsibility* ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan digunakan sebagai perluasan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.5.2 Aspek Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai informasi tambahan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengelola dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* untuk mempertahankan keberlanjutan khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan dan pengawasan terhadap aktivitas tata kelola perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility*, serta mengenai regulasi dalam

melakukan pada perusahaan pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para investor sebagai alat ukur sebelum melakukan investasi, dan juga digunakan sebagai alat pertimbangan untuk mengambil keputusan berdasarkan *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdapat penjelasan secara umum, ringkas, dan padat serta menggambarkan dengan tepat tentang pengaruh *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Bab pendahuluan ini berisikan: Gambaran Umum, Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematis Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori umum hingga khusus secara jelas mengenai *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, kewarganegaraan dewan komisaris, dan pengungkapan *corporate social responsibility* yang disertai penelitian terdahulu, dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang di akhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pendekatan, metode, dan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, serta menganalisis temuan agar dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini berisikan beberapa uraian tentang pengaruh *political visibility*,

pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang meliputi: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian dengan data yang sudah diseleksi dan pembahasan mengenai pengaruh pada variabel independen (*political visibility*, pendidikan dewan komisaris, kewarganegaraan dewan komisaris) terhadap variabel dependen (*corporate social responsibility*) dan pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis. Bab ini berisikan dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Dalam melakukan pembahasan sebaiknya dibandingkan terlebih dahulu dengan penelitian terdahulu atau dengan landasan teori yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Pembahasan pada bab ini merupakan uraian jawaban dari pertanyaan penelitian tentang pengaruh *political visibility*, pendidikan dewan komisaris, dan kewarganegaraan dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian yang diperuntukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.